



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO SUBAGYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 98051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	460.000.000
1. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI		
		Rp. 460.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.300.000
1. MOTOR, HONDA GL SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HIBAH		
DENGAN AKTA Rp. 1.600.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HIBAH DENGAN		
AKTA Rp. 1.200.000		
3. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI		
		Rp. 2.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	62.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	92.085.920
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	619.385.920
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	619.385.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 715345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	175.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 814 m2/300 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 115.000.000		
2. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	97.500.000
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	51.300.010
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	325.100.010
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	225.100.010

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALFIANI YOGATURIDA ISNAINI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 877175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	330.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/68 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/144 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	97.750.000
1. MOBIL, HONDA BRIO DD2 1.3 S M/T Tahun 2013, HADIAH Rp. 95.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO AT/AL115 S 28 D CW Tahun 2011, HADIAH Rp. 2.750.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.179.620
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	434.929.620
III. HUTANG	Rp.	360.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	74.929.620

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.